



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LKJ-IP

BAPENDA

KOTA DUMAI

2022

KATA PENGANTAR

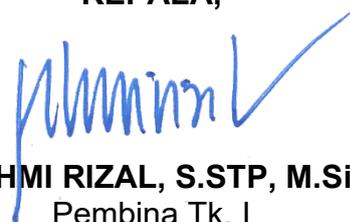
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban kinerja yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj-IP), yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat Eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang disusun berdasarkan Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcome dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang telah disusun masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Dumai, Januari 2023

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR*i*

DAFTAR ISII*ii*

BAB I

PENDAHULUAN1

- A. LATAR BELAKANG1
- B. MAKSUD DAN TUJUAN2
- C. LANDASAN HUKUM2
- D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI3
- E. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA7

- A. RENCANA STRATEGIS7
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 202212
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA13
- D. PERJANJIAN KINERJA14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 17

- A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH17
- B. REALISASI ANGGARAN23

BAB IV

PENUTUP32

LAMPIRAN

1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
3. RENCANA AKSI DARI PERJANJIAN KINERJA 2022
4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN/EVALUASI IKU
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang sarannya pada klasifikasi, tanggungjawab manajerial dari setiap bagian, dan masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang nyata dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan serta direalisasikan. Dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal itu maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang didalamnya berisi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022, merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja (LKj) Tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja (LKj-IP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKj sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, baik keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026;

6. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Gambaran organisasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Dumai memuat tentang kedudukan atau susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, sumberdaya aparatur, sumberdaya keuangan, sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kota Dumai merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai wadah proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Seiring dengan hal tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator dalam pengelolaan pendapatan daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target pendapatan daerah telah menyikapinya dengan berusaha untuk melakukan pembenahan organisasi kelembagaan. Seperti diketahui bahwa bidang tugas Bapenda sangat terkait dengan unit-unit kerja pengelola PAD lainnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Dumai No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, maka Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
- 2) Subbidang Penetapan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Penagihan, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- 2) Subbidang Penagihan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 2) Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Hukum dan Keberatan, terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengajuan dan Keberatan;
- 2) Subbidang Pemeriksaan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

7. UPT ; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan / atau Jabatan Pelaksana.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 74 orang ASN dan TKPK sebanyak 72 orang dengan komposisi berdasarkan pendidikan serta Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

a) Komposisi Sumber Daya Manusia

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	PNS/ASN	74	45	29
2	TKPK	72	32	40
Jumlah		146	77	69

b) Komposisi Pegawai / ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	STRATA 2 (S.2)	8	6	2
2	STRATA 1 (S.1)	21	8	13
3	D3	7	4	3
4	SMA	38	26	12
Jumlah		74	44	30

c) Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Pembina Tingkat I / (IV/b)	2	2	0
2	Pembina / (IV/a)	1	1	0
3	Penata Tk. I / (III/d)	17	12	5
4	Penata, / (III/c)	3	1	2
5	Penata Muda Tk.I, / (III/b)	11	3	8
6	Penata Muda / (III / a)	15	8	7
7	Pengatur Tk.I / (II/d)	18	12	6
8	Pengatur / (II/c)	4	4	0
9	Pengatur Muda Tk I, / (II/b)	2	2	0
10	Pengatur Muda, / (II/a)	1	1	0
Jumlah		74	46	28

d) Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai diisi oleh 21 orang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon III	5	5	0
3	Eselon IV	10	5	5
4	Kelompok JF	5	4	1
Jumlah		21	15	6

E. ISU STRATEGIS

Tantangan dalam pelayanan pada era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didalam melaksanakan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan/kendala. Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai saat ini perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan visi dan misi.

Dengan mengetahui permasalahan, diharapkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan produk hukum daerah;
2. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten;
3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pajak daerah;
4. Peningkatan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah;
5. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT;
6. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta pengembangan pengelolaan pajak daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

A. RENCANA STRATEGIS

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang disusun merupakan bagian integral dari implementasi Visi dan Misi Walikota Dumai periode 2021-2026 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai, yaitu:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Untuk itu penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah dirumuskan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Kota Dumai dalam mendukung Visi Kota Dumai, termasuk dalam **Misi Ke 4**, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi Kota Dumai, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan sasaran strategis beserta indikator kinerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	51	52	53	54	54	54

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten tugas pokok dan fungsi, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

“ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) “

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun sesuai dengan Misi Pembangunan Kota Dumai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (RPJMD) Tahun 2021-2026, yaitu :

” Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah “

3. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah kepada visi dan misi. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan, yaitu:

“ Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah “

4. Arah Kebijakan

Di samping sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, juga ada yang disebut dengan kebijakan yang akan ditempuh.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah :

“ Optimalisasi Pendapatan Daerah “

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan pengaturan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, guna untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun arah kebijakan sebagai instrumen pengelolaan pelaksanaan program-program pembangunan disebut sebagai *Kebijakan Internal*, sedangkan kebijakan sebagai instrumen pengaturan, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat disebut sebagai *Kebijakan Eksternal*.

a) Kebijakan Internal

Kebijakan Internal yang dirumuskan dalam Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari :

1. Profesionalisme Aparatur dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
 - a. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dibidang Pendapatan Daerah dan Diklat Struktural serta Pelatihan lainnya ;
 - b. Meningkatnya jumlah bahan referensi pengelolaan pendapatan Daerah dan buku pustaka ;
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
2. Meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ;
 - a. Meningkatnya jumlah aparatur yang berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Terselenggaranya program kegiatan yang sinergis dan akuntabel ;
 - c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas ;
 - d. Meningkatnya kualitas mutu pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak;
 - e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi yang diberikan bagi masyarakat .
3. Meningkatkan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - a. Meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - b. Akuratnya data subyek dan obyek PBB .
4. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - a. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. Meningkatnya penyuluhan dan sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Meningkatkan sistem pemungutan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel ;
 - a. Meningkatnya jumlah setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang melakukan penyetoran secara mandiri ;
 - c. Berkurangnya jumlah tunggakan wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah ;
 - d. Tersedianya tenaga pemungut yang trampil dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan umum ;

- a. Tersedianya program kerja terpadu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat ;
- b. Meningkatnya bentuk penyebarluasan dan informasi Pendapatan Daerah ;

b) Kebijakan Eksternal.

Kebijakan Eksternal yang dirumuskan dalam Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari :

1. Profesionalisme aparatur dalam komunitas usaha perekonomian dan perdagangan ;
 - a. Menegakkan supremasi hukum (Perda) khususnya dalam bidang pajak dan retribusi daerah
2. Usaha yang selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tempatan ;
 - a. Peningkatan intensitas pengawasan dan pengendalian ;
 - b. Menata kawasan peruntukan Pajak Bumi dan Bangunan

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan sistem dan prosedur administrasi pajak dan Retribusi Daerah yang cepat, tepat dan akurat ;
- b. Terwujudnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi ;
- c. Meningkatnya jumlah SPPT yang disampaikan ;
- d. Peningkatan pelunasan tunggakan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah ;
- e. Tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;
- f. Terlaksananya peningkatan penagihan tunggakan Pajak Daerah yang efektif dan efisien ;
- g. Terlaksananya pendataan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi ;
- h. Tercapainya kecocokan data dengan Unit Kerja terkait ;
- i. Tersedianya Staf yang melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan serta kemampuan yang dimiliki ;
- j. Tersedianya informasi yang mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tentang kewajibannya ;
- k. Tersedianya akurasi database Pajak dan Retribusi Daerah dengan sistem terkomputerisasi.

- I. Meningkatkan penguasaan sistem pengelolaan yang berbasis IT.

5. Program Pencapaian Sasaran Prioritas

Upaya operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara detail tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Berdasarkan fungsi yang digariskan, maka untuk menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang akan dicapai pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis program dengan indikator kinerja beserta target yang dicapai.

Tabel 2.2
Program Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran Program Strategis	Jumlah Program
1.	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Sasaran Program Strategis OPD yaitu “ ***Tercapainya Target Pendapatan Daerah*** ”, dengan program yang mencakup dalam sasaran prioritas yaitu :

“Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”

dengan Indikator sasaran prioritasnya sesuai dengan Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2022 dibawah ini, yaitu:

“ Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota “

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan 2022
I.	Misi 4 :	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik				
	Sasaran Strategis	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	51

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran program dan kegiatan.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2022 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Berikut merupakan gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.262.292.849	
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.262.292.849	
			1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	260.978.400
			2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	90.292.900
			3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	307.431.516
			4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.652.725.953
			5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	247.699.300
			6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	914.955.900
			7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	356.877.200
			8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	169.415.100
			9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	504.160.400
			10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.341.000
			11	Penagihan Pajak Daerah	416.375.100
			12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	101.509.900
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	151.530.180
TOTAL				5.262.292.849	

Perjanjian Kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp. 5.262.292.849,- (Lima milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

NO .	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	%	TARGET				TARGET TAHUN 2022	
					TW1	TW2	TW3	TW4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I.	Misi 4 :	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik								
	Sasaran Strategis	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1.	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	12,75	12,75	12,75	12,75	51

Anggaran Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pencapaian strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Program Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 5.262.292.849,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan melalui media Perjanjian Kinerja (PK) dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Strategis. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis yang ingin dicapai, yaitu :

“ Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah ”

Dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerapan prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan pada APBD Kota Dumai tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.383.352.224.486,33,- pencapaian realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.329.666.042.817,44,- atau 95,50% dengan rincian sebagai berikut :

- ~ Pendapatan Asli Daerah, target sebesar Rp.443.574.940.245,- dengan realisasi sebesar Rp. 463.982.146.810,44,- atau 102,52%.
- ~ Pendapatan Transfer, target sebesar Rp 939.777.284.241,33,- dengan realisasi sebesar Rp. 865.683.896.007,00,- atau 92,12%.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4,	PENDAPATAN DAERAH	1.392.335.943.486,00	1.329.666.042.817,44	95,50	1.287.005.084.625,14
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452.558.659.244,67	463.982.146.810,44	102,52	366.696.884.199,75
4.1.01.	Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	180.895.484.691,00	204.363.924.008,91	112,97	155.525.269.561,29
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	939.777.284.241,33	865.683.896.007,00	92,12	879.612.437.425,39
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	738.210.191.589,00	92,88	763.025.612.681,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	40.695.763.000,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	40.695.763.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022 (UnAudited BPK RI)

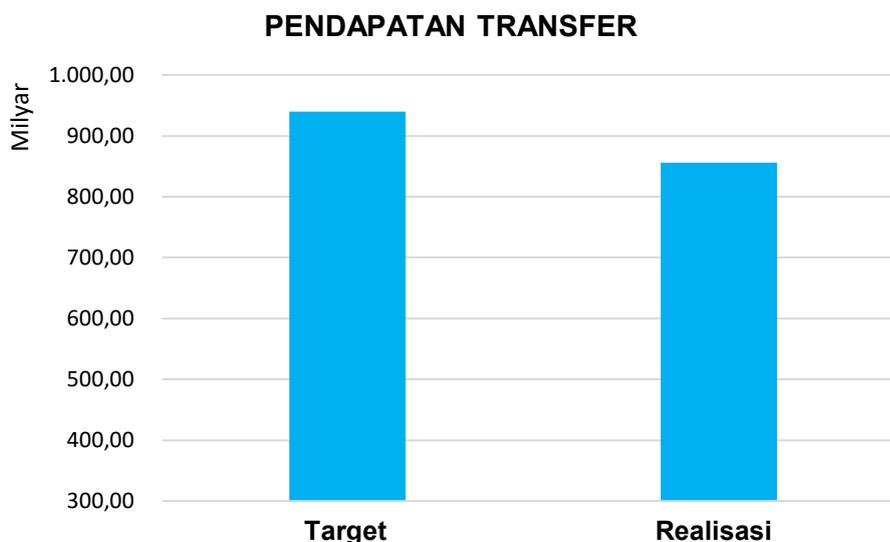
Grafik 3.1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Dumai Tahun 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022 (UnAudited BPK RI)

Grafik 3.1.2

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Dumai Tahun 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022 (UnAudited BPK RI)

Khusus Hasil Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, ditargetkan Tahun 2022 sebesar Rp 222.013.986.230,- dengan realisasi sebesar Rp 226.332.093.315,36,- atau 101,94% dengan rincian sebagai berikut :

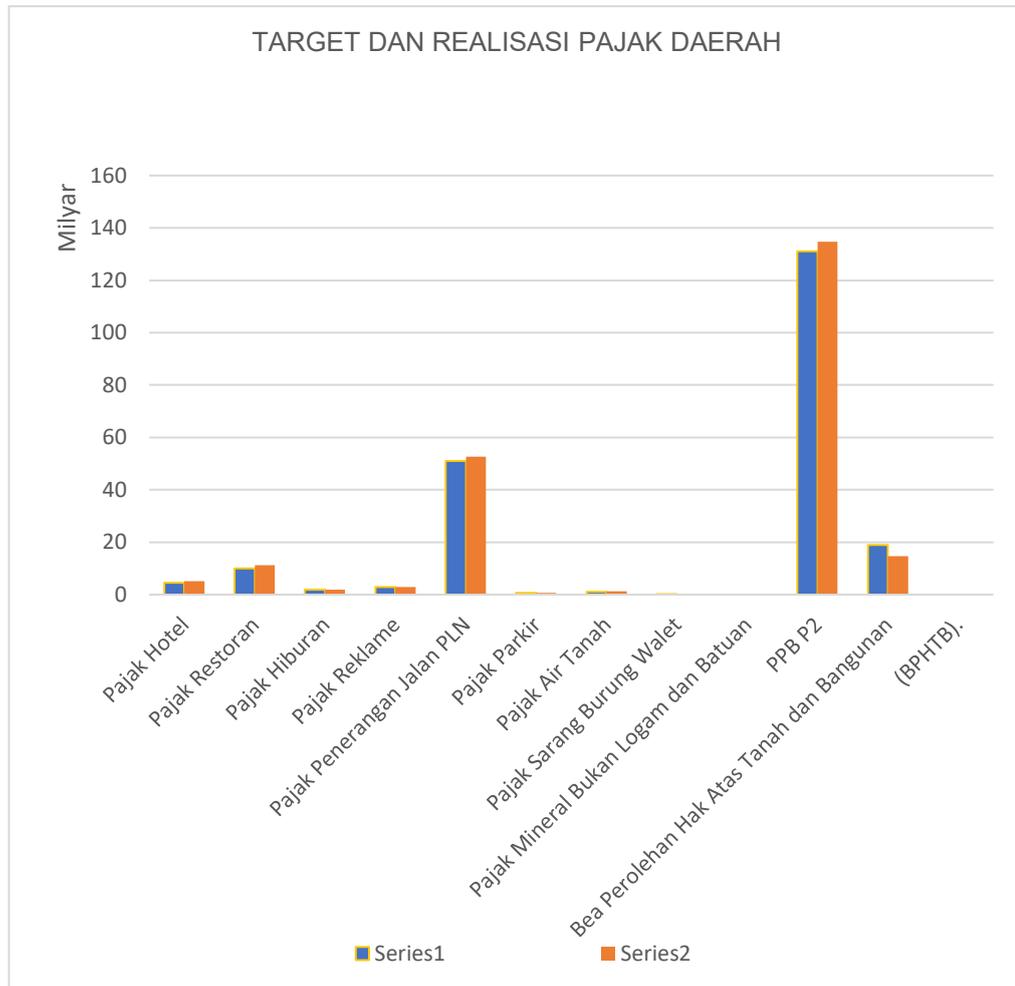
Tabel 3.2
Target dan Realisasi
Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.1.01.	Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53	4.361.663.283,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,56	9.048.442.070,00
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13	798.429.705,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67	2.564.739.618,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13	49.460.966.966,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07	696.543.612,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54	1.092.931.785,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	92.000.000,00	99.458.475,00	108,11	91.147.560,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,94	97.362.170.939,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88	20.502.590.449,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2022 per 31 Desember 2022 (UnAudited BPK RI)

Grafik 3.2

**Target dan Realisasi
Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**



Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Un Audit

Program yang mendukung untuk mencapai Sasaran Startegis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 melalui Perjanjian Kinerja yaitu :

“Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ”

dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

“ Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota “

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	51	48,78

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah

Penjelasan atas Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 pada Tabel 3.2 diatas adalah sebagai berikut :

1. Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 pada Indikator “**Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**” adalah sebesar **51 %**, dengan realisasi sebesar **48,78%** atau persentase capaian kinerja sebesar **95,65 %**.

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4
Pengukuran dan Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (%)	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	48,78	95,65	54	90,33

Tabel 3.5

Pengukuran dan Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan penerimaan Pajak daerah terhadap PAD	48	50,72	105,66

Terdapat penurunan capaian Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2021 s.d 2022 yaitu dari 105,66% menjadi 95,65% sebesar 10,01%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan salah satu komponen PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2022 sebesar 112,97% sehingga mempengaruhi rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PAD) yang terdiri dari 4 komponen yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Capaian target dan realisasi kinerja Badan Pendapatan daerah ditopang oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan pendukung antara lain :

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 11) Penagihan Pajak Daerah
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun kegiatan di atas merupakan indikator keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome di masa yang akan datang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikutsertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 alokasi Pagu Anggaran Belanja untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya Belanja Operasi adalah sebesar **Rp 24.379.826.574,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 1.468.105.510,-**. Dari total anggaran Belanja Daerah tersebut sebesar **Rp 25.847.932.084,-** dialokasikan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dengan

✓ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan program utama, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp.5.262.292.849,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp.4.991.311.918,-** atau **94,85 %**

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel. 3.5 di bawah :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Uraian Program (Indikator) / Kegiatan		Kinerja Output				Kinerja Keuangan			
		TARGET	REALISASI	SATUAN TARGET DAN REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
I	Belanja Operasi							24.379.826.574	
II	Belanja Modal							1.468.105.510	
III	Belanja Tidak Terduga							-	
IV	Belanja Transfer							-	
JUMLAH					98,79	25.847.932.084	24.506.792.187	94,81	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	%	98,44	20.585.639.235	19.515.480.269	94,80	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	%	100,00	86.515.200	76.422.782	88,33	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00	14.511.400	13.558.080	93,43	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100,00	19.201.900	17.424.772	90,75	
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100,00	22.416.600	19.124.430	86,75	
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Dokumen	100,00	21.578.400	20.124.430	93,26	
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Dokumen	100,00	8.806.900	5.868.300	66,63	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	%	100,00	16.000.720.788,53	15.100.289.827	94,38	
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Bulan	100,00	15.992.508.988	15.093.289.827	9438	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan	100,00	8.211.800	7.000.000	85,24	

	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	%	100,00	35.846.300	35.779.000	99,81
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	Dokumen	100,00	35.846.300	35.779.000	99,81
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	%	100,00	390.427.600	384.904.000	98,59
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	12	Bulan	100,00	67.040.000	64.540.000	96,27
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	Paket	100,00	31.273.600	31.250.000	99,92
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	12	Bulan	100,00	292.114.000	289.114.000	98,97
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	%	100,00	1.208.616.819,92	1.187.345.178	98,24
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	Bulan	100,00	16.564.400	16.564.400	100
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	Bulan	100,00	225.437.316,92	216.967.64896,24	96,24
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	Bulan	100,00	131.896.000	125.202.800	94,93
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	Bulan	100,00	175.036.700	174.973.050	99,96
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	Bulan	100,00	24.000.000	18.300.000	76,25
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Bulan	100,00	635.682.400	635.337.279	99,95
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	%	100,00	605.886.060	539.322.600	89,01
	1	Pengadaan Mebel	12	12	Bulan	100,00	132.298.600	126.179.300	95,37
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	Bulan	100,00	473.587.460	413.143.300	87,24
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	87,50	1.384.224.240	1.327.843.769	95,93
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Bulan	100,00	3.989.700	3.980.000	99,76

	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	100,00	440.899.000	425.858.069	96,59
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6	Bulan	50,00	38.332.000	14.400.000	37,57
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	100,00	901.003.540	883.605.700	98,07
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	%	100,00	873.402.230	863.573.113	98,87
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	Bulan	100,00	322.768.700	322.052.580	99,78
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	Bulan	100,00	182.571.800	179.424.343	98,28
	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	Unit	100,00	188.605.930	188.219.000	99,79
	4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	Unit	100,00	179.455.800	173.877.190	96,89
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	100	%	99,15	5.262.292.849	4.991.311.918	94,85
	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	100	%	99,15	5.262.292.849	4.991.311.918	94,85
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2	2	Dokumen	100,00	260.978.400	250.104.128	95,83
			4	4	Laporan				
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1	1	Dokumen	100,00	90.292.900	76.872.980	85,14
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9	9	Perda/ Perwa	100,00	307.431.516	295.466.769	96,11
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12	12	Bulan	100,00	1.652.725.953	1.624.062.884	98,27
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3000	3000	WP	100,00	247.699.299,92	245.976.634	99,30

	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	90	90	%	100,00	914.955.900	779.235.066	85,17
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150	150	WP	100,00	356.877.200	344.413.951	96,51
			10	10	OP				
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	9	8	OP	88,89	169.415.100,03	167.711.364	98,99
	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	1	Dokumen	100,00	504.160.400	480.640.891	95,33
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	4	Kali	100,00	88.341.000	76.025.603	86,06
	11	Penagihan Pajak Daerah	25	25	WP	100,00	416.375.099	407.532.228	97,88
			400	400	STPD				
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35	35	Berkas	100,00	101.509.900	94.988.323	93,58
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	Kali	100,00	151.530.180	148.281.097	97,86

Adapun penjelasan atas capaian realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan perbedaan data salah saji pendataan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan target 2 Dokumen 4 Laporan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan sebesar Rp 260.978.400,- terealisasi sebesar Rp 250.104.128,-, atau sebesar 95,83 %. dengan capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100% artinya tersusunnya Dokumen Prediksi Pendapatan Pajak / Retribusi sebanyak 2 laporan dan Laporan Perbedaan Data Salah saji Pencatatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 4 Laporan.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 1 Dokumen. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 90.292.900,- terealisasi sebesar Rp 76.872.980,-, atau sebesar 85,14%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100 % artinya Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 di Kota Dumai sebanyak 1 Dokumen.

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak dan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusun dengan target 9 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 307.431.516,- terealisasi sebesar Rp 295.466.769,-, atau sebesar 96,11%. Dengan capaian indikator kinerja keluaran 100 % artinya tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak dan tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan sebanyak 9 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah terhimpunnya data objek dan subjek Pajak Daerah untuk 1 tahun dengan target sebesar 12 Bulan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp1.652.725.953,- terealisasi sebesar Rp1.624.062.884,-, atau sebesar 98,27%. Dengan capaian indikator kinerja keluaran sebesar 100% artinya terhimpunnya data wajib pajak daerah selama 12 bulan.

5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di data dengan target 3.000 WP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 247.699.299,92,- terealisasi sebesar Rp 245.976.634,-, atau sebesar 99,30%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di data sebanyak 3000 WP.

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah terpeliharanya data Aplikasi SISMIOP dan SIG, tersedianya Data Base PBB P2 dengan target 90%. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 914.955.900,- terealisasi sebesar Rp 799.235.0661,-, atau sebesar 85,17%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpeliharanya data Aplikasi SISMIOP dan SIG, tersedianya Data Base PBB P2 sebesar 90%.

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar dan Penilaian PBB dan Peta blok/ ZNT dengan target 150 WP dan 10 OP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 356.877.200,- terealisasi sebesar Rp 344.413.951,-, atau sebesar 96,51%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100 % artinya tersedianya ketetapan dan realisasi PBB Objek Pajak Non Standar dan Penilaian PBB dan Peta blok/ZNTsebanyak 150 WP dan 10 OP Objek Pajak .

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Terlaksananya penetapan Pajak Daerah dengan target 9 OP. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 169.415.100,- terealisasi sebesar Rp 167.711.364,-, atau sebesar 98,99%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 88,89% artinya tercapainya penetapan Pajak Daerah sebanyak 8 OP dari target awal sebanyak 9 OP.

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB BPHTB dengan target 2 dokumen. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 504.160.400,- terealisasi sebesar Rp 480.640.891,-, atau sebesar 95,33%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya penyampaian SPPT PBB dan Pelayanan kepada Wajib Pajak yakni urusan PBB BPHTB sebanyak 2 Dokumen.

10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah monitoring dan rapat kordinasi dan evaluasi pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan target sebanyak 4 kali. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 88.341.000,- terealisasi sebesar Rp 76.025.603,-, atau sebesar 86,06%. Dengan nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya monitoring dan rapat kordinasi dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.

11. Penagihan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak serta Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak Yang di tagih dengan target 25 WP dan 400 STPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 416.375.099,60,- terealisasi sebesar Rp 407.532.228,-, atau sebesar 97,88%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja 100% artinya terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak sebanyak 25 WP serta Wajib Pajak dan Objek Pajak yang di tagih sebanyak 400 STPD.

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah Peningkatan pelayanan terhadap berkas keberatan Pajak/Retribusi Daerah yang dilayani dengan target 35 berkas. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 101.509.900,- terealisasi sebesar Rp 94.988.323,-, atau sebesar 93,58%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terselesaikannya berkas keberatan Pajak/Retribusi Daerah yang dilayani sebanyak 35 berkas.

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan target 4 kali. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp 151.530.180,- terealisasi sebesar 148.281.097,-, atau sebesar 97,86%. Dengan Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terpenuhinya target Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebanyak 4 kali pemeriksaan.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan Laporan yang menyajikan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan ini memuat pokok-pokok dari Rencana Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara-cara pencapaian tujuan dan pengukuran akuntabilitas kinerja Bapenda Tahun 2022 yang sudah ditetapkan. Dimana penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kota Dumai merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah melaksanakan **2 (dua)** Program dan **9 (sembilan)** Kegiatan dengan **40 (Empat Puluh)** Sub Kegiatan yang mana 1 (satu) Program merupakan program prioritas yaitu **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, sedangkan 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang.
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yaitu : “ **Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** “ terealisasi sebesar **51,04%** ,- dari target sebesar **51%** dengan tingkat capaian sebesar **100,08 %**.

- 3) Realisasi penyerapan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp. 24.506.792.187** ,- dari pagu anggaran sebesar **Rp. 25.847.932.084,-** meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan tingkat capaian sebesar **94,81 %**.
- 4) Realisasi kinerja output program/kegiatan/sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 terealisasi sebesar **98,79%** dari target sebesar **100%**.
- 5) Dari seluruh capaian di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022 dapat dikategorikan **SANGAT TINGGI** dari segi capaian IKU dan capaian penyerapan anggaran.

B. SARAN

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja kedepannya agar dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan pada Renstra dan RPJMD Kota Dumai.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan, yaitu antara lain :

- a. Belum semua Objek Pajak terdata dan terdaftar secara baik;
- b. Wajib Pajak belum melaporkan omset sesuai dengan hasil transaksi atau kondisi sebenarnya;
- c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak belum optimal.

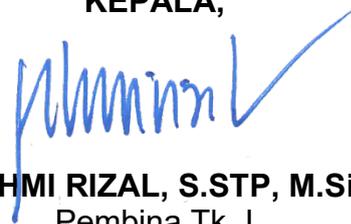
Adapun solusi yang diusulkan, yaitu:

- a. Melakukan pendataan dan pendaftaran secara intensif dan *continue* (terus-menerus) terhadap Wajib Pajak;
- b. Melakukan pemeriksaan Wajib Pajak serta memasang alat perekam data transaksi (*tapping box*);

- c. Melakukan pengawasan dan penertiban objek pajak;
- d. Secara terus menerus melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah kepada wajib pajak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 ini disusun, dan selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Dumai serta pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 199711 1 001